



Pejabat Bermasalah Akan Diganti

Ahok Janji Evaluasi Tiga Bulan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, akan mengevaluasi kinerja para pejabat hasil lelang yang telah dilantik. Bila para pejabat tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka segera diganti. Termasuk bila terbukti tersangkut masalah hukum. "Kita tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang bermasalah," ujar Ahok, kemarin (3/2).

Ahok juga menegaskan, para pejabat yang telah dilantik awal tahun 2015 itu akan mendapatkan penilaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan. Mereka yang tak menunjukkan hasil maksimal akan digantikan oleh pegawai yang berada dalam daftar antrean dan memiliki nilai tes sesuai dengan standar.

Skema perombakan pejabat, sambung Ahok, akan dilakukan setiap enam bulan. "Langkah ini bisa menyaring pejabat yang benar-benar berkualitas, dan bukan pejabat bermasalah," ungkap dia.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, tidak ada ruang bagi pejabat yang terjerat hukum. Apabila para pejabat dimaksud terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka wajib ditindak.

Meski demikian, kini pihaknya masih mengedepankan praduga tidak bersalah. "Saya sekarang masih kedepankan praduga tidak bersalah. Namun apabila nanti terbukti, tidak akan ada ampun buat mereka," tegas pria yang akrab disapa Pras.

Seperti diketahui, Pejabat hasil lelang yang dilantik Ahok beberapa waktu lalu. Diduga banyak yang bermasalah. Kepala Dinas Perhubungan Bunjamin Bukit, yang diduga sudah menyandang status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat panggilan tersangka SP 1165/o.1.5/Fd.1/08/2010.

Begitupun dengan Kepala Dinas PU Binamarga Yusmada Faizal yang tersangkut kasus dugaan korupsi saat menjabat Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PU. (wok)



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



INDIKASI KORUPSI PROYEK JALAN

PEMERIKSAAN ANGGARAN 2013 DI DINAS PU (BIDANG JALAN)

- **Proyek Pelebaran Jalan Penunjang MRT**
 - Anggaran Rp 38.552.000.000, realisasi Rp 30.191.108.053,45 (78,31 %)
 - Dugaan kuat tak sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012
 - Terjadi kelebihan pembayaran
 - Indikasi kerugian negara sebesar Rp 1.459.111.853,19
 - Saat itu Kepala Bidang Jalan Yusmada Faizal (kini Kadis PU Bina Marga)

- **Proyek Peningkatan Jalan Pluit Karang Barat**
 - Anggaran Rp 7.212.625.000, realisasi Rp 5.879.698.902 (81,52 %)
 - Kekurangan volume pada pengerjaan pengaman
 - Beton readymix K-250 (lantai kerja), beton jepit, galian biasa, laston lapis antara perata (AC-BC), dan pembongkaran beton
 - Perbedaan spesifikasi, antara lain:
 - Pekerjaan perkerasan jalan beton, disyaratkan dalam kontrak memakai beton dengan kuat tekan K-350, namun beton yang terpasang adalah beton dengan kuat tekan K-345.
 - Pekerjaan tali-tali air ukuran 40/30, spesifikasi yang disyaratkan setiap 1 M3 beton terdapat besi 67 kg, namun terpasang dalam 1 M3 volume tali-tali air adalah 26,11 kg.
 - Indikasi kerugian daerah Rp 248.948.534

- **Proyek Pelebaran Jalan Panjang Tahap II**
 - Indikasi kerugian daerah sebesar Rp 1.394.314.002
 - Pekerjaan fiktif
 - Kekurangan volume
 - Tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak